Article Info

Submitted: 11 Maret 2019 | **Reviewed:** 10 April 2019 | **Accepted:** 18 Juni 2019

KETIKA TERMOHON MENOLAK TERLIBAT DALAM PERSIDANGAN ARBITRASE

Garuda Wiko¹

Abstract

Although arbitration has been made based on the agreement of the parties and stated in writing in the Main Contract, this does not guarantee that the parties will immediately be willing to participate in the arbitration process when a dispute occurs. It is possible that one of the arbitration parties was absent and was not willing to be involved in the trial process. In very rare circumstances, the arbitration applicant may cancel / deny his participation in the trial process. This article will describe the regulations, practices and expert views in the implementation of the arbitration proceedings without the presence of the respondent. It is expected that from this research, an overview will be obtained in carrying out the arbitration proceedings without the applicant. The findings obtained are that there are no extensive guidelines in Indonesia that can be used as a guide by the arbitrators in carrying out such a trial process, especially related to proof and examination of cases. Some of the principles and regulations set out in the Civil Procedure Code may be adopted to answer some things that are not regulated in the arbitration legal framework in Indonesia. Efforts should be made to develop a guideline framework for arbitrators so that there are similarities and quality assurance of decisions made in the trial process without the presence of the respondent.

Keywords: *arbitration awards; code of conduct; verstek*

Abstrak

Meskipun arbitrase telah dibuat berdasarkan kesepakatan para pihak dan dicantumkan secara tertulis di dalam Kontrak Utamanya, hal ini tidak menjamin bahwa para pihak akan serta merta bersedia untuk berpartisipasi dalam proses arbitrase ketika suatu sengketa terjadi. Ada kemungkinan salah satu pihak arbitrase mangkir dan tidak bersedia terlibat dalam proses persidangan. Dalam kondisi yang sangat jarang, termohon arbitrase dapat membatalkan/mengingkari keikutsertaannya dalam proses persidangan. Artikel ini akan mendeskripsikan regulasi, praktik dan pandangan ahli dalam pelaksanaan proses persidangan arbitrase yang dilakukan tanpa kehadiran termohon. Diharapkan dari penulisan ini didapatkan gambaran terkait proses persidangan arbitrase tanpa pihak termohon. Penemuan yang didapat adalah belum ada pedoman yang ekstensif di Indonesia yang dapat dijadikan pedoman oleh arbiter dalam menjalankan proses persidangan seperti itu terutama terkait dengan pembuktian dan pemeriksaan perkara. Beberapa prinsip dan peraturan yang diatur dalam Hukum Acara Perdata mungkin dapat diadopsi untuk menjawab beberapa hal yang tidak diatur di dalam kerangka hukum arbitrase di Indonesia. Perlu adanya upaya untuk mengembangkan suatu kerangka pedoman bagi para arbiter agar terdapat kesamaan dan penjaminan kualitas terhadap putusan-putusan yang dibuat dalam proses persidangan tanpa kehadiran termohon.

Kata kunci: *code of conduct; putusan arbitrase; verstek*

¹ Fakultas Hukum, Universitas Tanjungpura, Jl. Prof. Hadari Nawawi, Pontianak, Kalimantan Barat, e-mail: garudawiko@lawgng.com, tlp: 0811572144

I. Pendahuluan

Ketika seseorang membuat suatu kesepakatan dengan orang lain untuk melaksanakan (atau tidak melaksanakan) sesuatu, maka hampir bisa dipastikan keinginan mereka adalah untuk melaksanakan kesepakatan tersebut sesuai dengan ketentuannya dalam situasi yang damai hingga hak dan kewajiban yang dicantumkan dalam kesepakatan tersebut selesai dilaksanakan. Sayangnya, dalam kenyataannya, tidak semua kesepakatan dapat berjalan lancar tanpa ada perselisihan antara kedua belah pihak yang bersepakat. Perselisihan ini dapat terjadi jika terjadi perbedaan kepentingan maupun penafsiran terhadap kesepakatan. Seringkali, perselisihan dan ketidaksamaan persepsi ini kemudian berujung pada sengketa. Dalam hal sengketa telah terjadi, mau tidak mau para pihak harus mencari suatu cara untuk dapat mencari jalan tengah atas permasalahan tersebut.

Dalam teori penyelesaian sengketa hukum, perselisihan hukum perdata terutama dalam bidang perdagangan dilakukan melalui proses litigasi yang melibatkan proses peradilan publik. Proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan pada dasarnya meletakkan para pihak dalam posisi berlawanan yang kemudian akan diputuskan oleh hakim/majelis hakim siapa yang kalah

dan siapa yang menang. Bentuk penyelesaian seperti ini dianggap berbahaya oleh banyak pelaku usaha. Maka dari itu, muncul suatu mekanisme yang dapat digunakan pelaku usaha sebagai alternatif yang sering dikenal sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa. Alternatif Penyelesaian Sengketa, secara teoritis dibagi menjadi dua macam yakni prosedur yang bersifat non-adjudikatif (Negosiasi, Mediasi dan Konsiliasi) dan adjudikatif (Arbitrase).²

Proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase bergantung dari kesepakatan para pihak. Pihak yang memiliki intensi untuk menyelesaikan sengketanya melalui arbitrase harus terlebih dahulu membuat kesepakatan secara tertulis. Kesepakatan ini dapat berupa klausul arbitrase yang melekat pada Perjanjian Utama maupun perjanjian terpisah. Pemilihan arbitrase ini memberikan wewenang absolut kepada arbitrase untuk menyelesaikan sengketa apapun yang muncul dari perjanjian utama. Karena alasan inilah

² Perbedaan mendasar antara prosedur penyelesaian sengketa yang bersifat non-adjudikatif dan adjudikatif terletak pada kekuatan eksekutorial hasil proses penyelesaian sengketanya. Pada prosedur non-adjudikatif, luaran yang dihasilkan adalah bentuk kesepakatan (perjanjian), adapun prosedur adjudikatif seperti arbitrase menghasilkan putusan arbitrase yang memiliki kekuatan eksekutorial sehingga eksekusinya dapat dimintakan melalui pengadilan.

arbitrase biasa disebut dengan “*creature of contract*”.³

Meskipun arbitrase telah dibuat berdasarkan kesepakatan para pihak dan dicantumkan secara tertulis di dalam Kontrak Utamanya, hal ini tidak menjamin bahwa para pihak akan serta merta bersedia untuk berpartisipasi dalam proses arbitrase ketika suatu sengketa terjadi. Ada kemungkinan salah satu pihak arbitrase mangkir dan tidak bersedia terlibat dalam proses persidangan. Dalam kondisi yang sangat jarang, pemohon arbitrase dapat membatalkan/mengingkari keikutsertaannya dalam proses persidangan. Jika kondisi ini terjadi, Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (“UU Arbitrase”) mengatur PEMOHON yang tidak hadir tanpa alasan yang sah sedangkan telah dipanggil secara patut, maka surat tuntutan dinyatakan gugur dan tugas arbiter atau majelis arbitrase dianggap selesai.⁴ BANI *Arbitration Rules and Procedur* juga mengatur yang hampir sama.⁵ Pembatalan/pengingkaran pihak

pemohon dalam proses arbitrase seperti ini tidak akan banyak menimbulkan masalah terhadap arbiter. Arbitrase atau majelis arbitrase dalam hal ini hanya perlu memastikan dua hal: 1) pemohon telah dipanggil secara patut⁶; 2) pemohon tidak memberikan notifikasi atau berita apapun baik kepada arbiter/majelis maupun kepada institusi arbitrasenya atas ketidakhadirannya. Jika dapat dipastikan kedua hal di atas telah terpenuhi, maka permohonan arbitrase pemohon gugur dan arbiter/majelis telah selesai tugasnya.

Kondisi yang lebih sering terjadi, dan notabene lebih banyak menimbulkan masalah hukum adalah pada saat termohon arbitrase menolak atau bahkan tidak merespon sama sekali proses persidangan arbitrase. Hal ini sangat mungkin dan seringkali terjadi. Ada beberapa alasan yang mungkin menjadi dasar termohon dalam melakukan tindakan ini:

1. Pihak termohon tidak familiar dengan proses arbitrase. Situasi ini sering terjadi dimana pihak-pihak dari suatu kontrak yang telah mencantumkan pilihan arbitrase dalam kontraknya tidak memiliki

³ Lebih lanjut mengenai konsep “*Arbitration is a creature of contract*” dapat dilihat pada: Aragaki, Hiro N., *Arbitration: Creature of Contract, Pillar of Procedure* (May 3, 2018). 8 Y.B. Arb. & Mediation 2 (2016); Loyola Law School, Los Angeles Legal Studies Research Paper No. 2018-14.

⁴ Pasal 43, Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

⁵ Art 21 par. 1 of BANI R&P stated: *In case the Claimant fails and/or does not come to the first*

session conducted by the Tribunal without a legitimate reason, then the Tribunal may declare the Petition for Arbitration annulled.

⁶ Arbiter harus memperhatikan waktu-waktu penting sejak pemohon mengajukan surat permohonan arbitrase sampai dengan pemanggilan sidang pertama dan alamat korespondensi termohon sudah benar dan sah.

pemahaman mendasar tentang apa itu arbitrase dan legal force of an arbitration award. Hasilnya, timbul keengganan pihak termohon untuk melibatkan diri dalam proses persidangan.

2. Masalah finansial. Hal ini dapat dimengerti karena proses penyelesaian sengketa arbitrase memerlukan biaya pendahuluan yang tidak sedikit. Tidak seperti penyelesaian sengketa di pengadilan, proses persidangan di arbitrase membutuhkan dukungan finansial yang tidak sedikit misalnya dalam hal membayar *arbitration fee* yang harus dibayar di awal dan kebutuhan *lawyer*. Namun pada dasarnya permasalahan ini dapat diatasi karena pada prakteknya biaya arbitrase seringkali ditalangi dulu oleh pemohon dan akan disesuaikan kembali ketika penerbitan putusan.
3. Hal-hal lain misalnya keraguan dari sisi responden dalam memenangkan arbitrase atau bahkan termohon merasa klaim yang diajukan oleh pemohon terlalu mengada-ada dan dibuat-buat sehingga termohon enggan untuk merespon. Selain itu, misalnya skenario seperti ini: pemohon mengajukan permohonan arbitrase melawan termohon dalam perkara jual beli misalnya. Pada awalnya

termohon merespon dan bekerjasama dalam proses persidangan dan sudah menunjuk pengacara. Pada waktu yang telah ditentukan dimana termohon harus memberikan jawaban dan bukti-bukti klaim, tidak ada dokumen yang dikirimkan. Pada saat diklarifikasi melalui pengacara diketahui bahwa termohon secara sengaja not providing any document to the lawyers karena jika hal ini dilakukan maka dokumen-dokumen yang berkaitan dengan rahasia dagang termohon terpaksa harus terungkap. Ada kecurigaan bahwa pemohon secara sengaja mengajukan permohonan arbitrase untuk mendapatkan rahasia dagang milik termohon.⁷

Penjelasan di atas adalah untuk menunjukkan banyaknya kemungkinan termohon untuk tidak berpartisipasi dalam proses persidangan. Pada situasi ini, Pihak Pemohon akan dihadapkan pada dua pilihan, 1) membatalkan proses persidangan arbitrase dan menyepakati forum penyelesaian sengketa lain dengan pihak TERMOHON (jika ada kesepakatan ini) dan 2) melanjutkan proses persidangan tanpa kehadiran

⁷ Ilustrasi kasus terdapat di: [...], Arbitration Potholes: One Party Won't Provide Discovery, <http://www.daveadr.com/arbitration-potholes-one-party-wont-provide-discovery/>, akses tanggal 6 September 2018

pihak TERMOHON.

Praktek di Indonesia secara umum menerima bahwa arbiter memiliki Tanggung jawab untuk terus melakukan proses arbitrase bahkan tanpa kehadiran Termohon. Namun, tanggung jawab ini memiliki beban yang sangat besar. Terdapat perbedaan yang mendasar dalam memeriksa perkara secara kontradiktior dan dengan proses persidangan tanpa lawan. Dalam proses persidangan yang hanya terdiri dari satu pihak, arbiter/majelis harus ekstra hati-hati dalam memastikan adanya keseimbangan antara pemenuhan hak pemohon sebagai satu-satunya pihak yang terlibat dalam perkara dan memastikan bahwa substansi putusan adalah sesuai dengan hukum dan perundang-undangan serta rasa keadilan dan meminimalisir sanggahan dari pihak lawan.

Artikel ini akan mendeskripsikan regulasi, praktik dan pandangan ahli dalam pelaksanaan proses persidangan arbitrase yang dilakukan tanpa kehadiran termohon. Diharapkan dari penulisan ini didapatkan gambaran dan pedoman dalam menjalankan proses persidangan arbitrase tanpa pihak pemohon.

II. PEMBAHASAN

A. Tinjauan Umum mengenai Penyelesaian Sengketa melalui Arbitrase

1. Metode Penyelesaian Sengketa melalui Arbitrase

Model penyelesaian sengketa dapat dibagi menjadi dua, yakni model litigasi dan non-litigasi:

- a. Penyelesaian melalui forum litigasi adalah yang kita kenal sebagai persidangan di muka pengadilan. Karakteristik dari model penyelesaian ini adalah dengan menempatkan para pihak yang saling berlawanan satu sama lain. Hasil akhir dari persidangan umumnya bersifat *win-lose* (ada yang kalah dan ada yang menang).
- b. Penyelesaian melalui forum non-litigasi tidak lebih formal dibanding litigasi. Penyelesaian melalui metode ini dibagi lagi menjadi dua kategori dimana penyelesaian yang tidak melibatkan pihak ketiga diluar pihak-pihak yang berkepentingan disebut sebagai negosiasi, dan penyelesaian yang melibatkan pihak ketiga bersifat netral disebut konsiliasi, mediasi dan arbitrase.

Selain pembagian model sebagaimana disebutkan diatas, metode penyelesaian sengketa dapat pula dibagi

berdasarkan sifat dari putusan atau kesepakatan yang dihasilkan. Dalam konteks ini, pengadilan dan arbitrase masuk dalam kategori adjudikasi yang berarti putusan yang dihasilkan melalui kedua forum tersebut bersifat mengikat bagi para pihak. Adapun pada negosiasi, konsiliasi dan mediasi, hasil akhirnya berupa kesepakatan (bukan putusan), yang mana pelaksanaannya serupa dengan kontrak atau perjanjian. Pembagian kategori berbagai metode penyelesaian sengketa seperti ini pada akhirnya akan memudahkan para pihak dalam menentukan metode mana yang lebih cocok untuk digunakan dalam menyelesaikan sengketa yang tengah dihadapi.

Arbitrase merupakan “cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa”. UU 30/1999 membedakan antara arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Berbeda dengan alternatif penyelesaian sengketa lainnya, di dalam mekanisme arbitrase, pihak ketiga atau arbiter memiliki kewenangan penuh dalam merumuskan penyelesaian sengketa. Ketika sengketa telah dibawa ke hadapan arbitrase, para pihak tidak lagi memiliki kuasa terhadap luaran penyelesaian yang mana di dalam arbitrase disebut dengan “putusan/award”. Maka dari itu,

penyelesaian sengketa arbitrase tidak lagi berorientasi pada kepentingan, tetapi lebih kepada hak dan kewajiban hukum para pihak.

Sebagai bentuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan, arbitrase memiliki beberapa keunggulan. Pertama, para pihak memiliki kebebasan penuh dalam memilih hakim atau arbiter. Kebebasan ini mencakup penentuan jumlah arbiter (arbiter tunggal atau majelis arbiter (3 arbiter)) dan siapa saja yang ditunjuk sebagai arbiter. Para pihak bebas memilih ahli dari berbagai latar belakang untuk duduk sebagai arbiter, dapat memilih ahli hukum atau ahli dibidang lain yang dianggap menguasai substansi kasus. Para pihak juga bebas memilih tempat arbitrase, hukum acara dan hukum substansi yang berlaku dalam persidangan asalkan sesuai dengan kesepakatan. Para pihak dapat saja memilih untuk menggunakan prosedur arbitrase UNCITRAL dan melaksanakan arbitrasenya di wilayah Indonesia namun memilih untuk menggunakan hukum substansi Singapura. Selain itu, para pihak bebas menentukan tujuan atau tugas arbitrase tersebut. Artinya, putusan arbiter tidak boleh melebihi klaim dari para pihak (*ultra petita*).

Jangka waktu pelaksanaan arbitrase dibatasi oleh UU dan prosedur pelaksanaan arbitrase. UU No. 30/1999 membatasi pemeriksaan atas sengketa

untuk diselesaikan dalam waktu paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari sejak arbiter atau majelis arbitrase terbentuk (pasal 48 ayat 1). *BANI Rules and Procedure* mewajibkan Majelis arbitrase untuk menetapkan putusan akhir dalam waktu paling lama 30 hari sejak ditutupnya persidangan. Pengaturan pembatasan waktu seperti ini menghasilkan penyelesaian sengketa yang cepat dan efisien dan tentu saja biayanya akan lebih murah dibandingkan penyelesaian melalui litigasi.

Beberapa kelemahan arbitrase yakni pelaksanaannya harus berdasarkan kesepakatan para pihak. Maka dari itu, arbitrase disebut juga dengan istilah "*creature of contract*", ia tidak akan ada tanpa adanya kesepakatan/perjanjian. Kelemahan berikutnya yakni, walaupun UU telah mengatur bahwa putusan arbitrase bersifat final dan mengikat, tak jarang pihak yang kalah enggan untuk melaksanakan hasil putusan. Hal ini dikarenakan putusan arbitrase tidak memiliki kekuatan eksekutorial sebagaimana putusan pengadilan. Untuk mendapatkan sifat tersebut, putusan arbitrase harus terlebih dahulu dimintakan permohonan eksekusi kepada Pengadilan Negeri. Terakhir, putusan arbitrase dapat dibatalkan oleh pengadilan. Hal ini juga diatur di dalam UU Arbitrase. Tidak jarang, hak para pihak untuk mengajukan pembatalan

menjadi taktik untuk menunda pelaksanaan putusan.

2. Putusan Arbitrase

Putusan arbitrase adalah keputusan arbiter yang didasarkan pada hal-hal yang diajukan kepadanya di dalam suatu proses arbitrase.⁸ Fungsi Putusan arbitrase:

- 1) Terutama untuk membuat dan mencatat keputusan arbiter yang sudah final dan mengikat mengenai masalah yang diarbitrasekan. Dengan diterbitkannya putusan secara tertulis, para pihak dalam arbitrase mendapatkan informasi yang lengkap mengenai putusan dan latar belakang serta alasan-alasan penjatuhan putusan oleh arbiter.
- 2) Dapat digunakan oleh pihak yang menang dalam arbitrase untuk diajukan ke pengadilan jika pihak yang kalah gagal memenuhi kewajibannya berdasarkan putusan.
- 3) Dapat digunakan oleh pihak yang kalah untuk mengajukan pembatalan putusan arbitrase ke pengadilan.

Pasal 60 UU Arbitrase mengatur putusan arbitrase bersifat final dan

⁸ Ray Turner. 2005. *Arbitration Awards: A Practical Approach*. UK: Blackwell Publishing. hal 3. Terjemahan bebas dari: "*An award is the decision of the arbitrator based upon the submission or submissions made to him in an arbitration.*"

mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak. Adapun Pasal 57 UU Arbitrase mengatur putusan diucapkan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah pemeriksaan ditutup. Untuk perbandingan, pasal 30 ICC Arbitration Rules mengatur bahwa putusan akhir harus diucapkan dalam jangka waktu 6 bulan sejak tanggal pihak arbitrase menandatangani *term of reference* arbitrase.⁹ SIAC Arbitration Rules 2013 mengatur bahwa putusan harus diucapkan dalam jangka waktu 6 bulan sejak majelis arbitrase dibentuk.¹⁰ Beberapa *Arbitration Rules* tidak mencatumkan ketentuan mengenai jangka waktu pengucapan putusan contohnya UNCITRAL dan LCIA.

Dimana majelis arbitrase terdiri dari 3 (tiga) orang, pengambilan putusan berdasarkan putusan mayoritas dari para arbiter. Jika terjadi perbedaan pendapat, putusan Ketua Majelis Arbitrase yang berlaku.¹¹ Ketentuan ini sejalan dengan ICC Arbitration Rules, LCIA Arbitration

Rules dan SIAC Rules tahun 2013.¹² Putusan arbitrase dapat bersifat deklaratoir (menerangkan atau menegaskan), konstitutif (meniadakan atau menimbulkan suatu keadaan hukum yang baru), maupun condemnatoir (penghukuman).

Karena sifat arbitrase berbeda dengan pengadilan, maka putusan arbitrase juga memiliki beberapa perbedaan dengan Putusan Pengadilan:¹³

- 1) Pengadilan diputuskan oleh satu orang hakim, sedangkan putusan arbitrase berasal dari orang yang ditunjuk oleh para pihak untuk memutus sengketa yang ada diantara mereka. Berbeda dengan hakim yang mendapatkan kewenangannya melalui peraturan perundang-undangan, arbiter memiliki hubungan kontraktual dengan pihak dalam arbitrase (melalui penunjukan arbiter oleh salah satu pihak). Konsekuensinya,

⁹ Art. 30 (1) ICC Arbitration Rules: "*The time limit within which the arbitral tribunal must render its final award is six months. Such time limit shall start to run from the date of the last signature by the arbitral tribunal or by the parties of the Terms of Reference*"

¹⁰ Art 5.2 (d) SIAC Rules Tahun 2013: "*The award shall be made within six months from the date when the Tribunal is constituted unless, in exceptional circumstances, the Registrar extends the time*"

¹¹ Susanti Adi Nugroho, *Penyelesaian Sengketa Arbitrase dan Penyelesaian Hukumnya*, hal 211

¹² Art 31 (1) ICC Arbitration Rules: "*When the arbitral tribunal is composed of more than one arbitrator, an award is made by a majority decision. If there is no majority, the award shall be made by the president of the arbitral tribunal alone*"

Art. 28.5 SIAC Rules 2013: "*Where there is more than one arbitrator, the Tribunal shall decide by a majority. Failing a majority decision, the presiding arbitrator alone shall make the award for the Tribunal.*"

Art 26.3 LCIA Arbitration Rules: "*...failing a majority decision on any issue, the chairman of the Arbitral Tribunal shall decide that issue.*"

¹³ Ray Turner, *Op Cit*, hal 13.

arbiter perlu menunjukkan bukti atau informasi bahwa ia telah secara sah memiliki hak dan wewenang untuk menyelesaikan sengketa diantara para pihak melalui penunjukan arbiter oleh salah satu pihak (sedangkan hakim tidak perlu).

- 2) Putusan pengadilan sudah merupakan bagian dari prosedur pengadilan, sedangkan putusan arbitrase perlu diajukan terlebih dahulu ke pengadilan untuk mendapatkan perintah ketua pengadilan negeri agar dapat dilaksanakan sesuai ketentuan pelaksanaan putusan dalam perkara perdata (Pasal 64 UU No. 30/1999).
- 3) Kewenangan hakim di dalam pengadilan adalah sama dengan hakim yang lain. Sebaliknya di dalam arbitrase, kewenangan arbiter dapat saja berbeda tergantung dengan *term of agreement* para pihak.

Tidak ada bentuk baku putusan arbitrase. Putusan arbitrase dibentuk sesuai dengan kebutuhan, asalkan jelas dan koheren. Pasal 54 ayat (1) UU Arbitrase mengatur substansi putusan arbitrase sebagai berikut:

- 1) Kepala putusan yang berbunyi "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA";
- 2) nama lengkap dan alamat para pihak;

- 3) uraian singkat sengketa;
- 4) pendirian para pihak;
- 5) nama lengkap dan alamat arbiter;
- 6) pertimbangan dan kesimpulan arbiter atau majelis arbitrase mengenai keseluruhan sengketa;
- 7) pendapat tiap-tiap arbiter dalam hal terdapat perbedaan pendapat dalam majelis arbitrase;
- 8) amar putusan;
- 9) tempat dan tanggal putusan; dan
- 10) tanda tangan arbiter atau majelis arbitrase.

Adapun syarat formal putusan arbitrase:

- 1) a) harus dalam bentuk tertulis, b) ditandatangani oleh para arbiter¹⁴, c) harus menyebutkan tanggal dan tempat arbitrase, dan d) harus berisi pertimbangan-pertimbangan tercapainya putusan kecuali para pihak bersepakat pertimbangan tidak diperlukan (UNCITRAL Model Law)
- 2) Harus berisi identifikasi para pihak.
- 3) Penyusunan putusan harus dilakukan oleh arbiter dan tidak dilimpahkan kepada orang lain. Namun arbiter dapat dibantu oleh asisten atau *researcher* dalam menyusun putusannya.¹⁵

¹⁴ Pasal 54 ayat (2) UU No 30/1999: "*Tidak ditandatanganinya putusan arbitrase oleh salah seorang arbiter dengan alasan sakit atau meninggal dunia tidak mempengaruhi kekuatan berlakunya putusan*".

¹⁵ Priyatna Abdurrasyid. 2011. Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS): Suatu Pengantar. PT Fikahati Nafiska. hal 114.

- 4) Jika di dalam perjanjian diatur bahwa putusan harus dipublikasikan, maka putusan baru berlaku sah ketika sudah dipublikasi.¹⁶
- 5) Tidak diperlukan risalah atau perincian.¹⁷
- 6) Putusan harus diberi materai.¹⁸

Putusan arbitrase akan disusun dari pertimbangan-pertimbangan arbiter yang didasarkan pada 1) fakta yang dihimpun dari persidangan; dan 2) hukum. Tidak ada metode baku dalam proses penyusunan putusan arbitrase. Arbiter biasanya memiliki style dan metodenya sendiri dalam menjawab isu-isu di dalam arbitrase. Persiapan dalam menyusun putusan arbitrase terutama terletak pada proses *decision making* yang pada intinya mempertimbangkan apa saja yang perlu dikutip di dalam putusan dan menjawab isu-isu pokok di dalam proses arbitrase. Dalam menyelesaikan isu-isu substantif, arbiter perlu memperhatikan terlebih dahulu dasar dari pertimbangannya yang dapat didasarkan pada hukum, konsep keadilan (*justice and fairness*) atau kombinasi keduanya. Isu-isu tersebut kemudian perlu disortir berdasarkan urutan yang efektif.

Dari penyusunan isu, arbiter akan mulai menyusun pertimbangan-pertimbangan untuk menyelesaikan tiap-tiap isu. Beberapa isu merupakan hal-hal yang terkait dengan fakta dan akan diselesaikan hanya berdasarkan bukti yang faktual, tidak didasarkan pada konsep-konsep hukum. Beberapa isu lain merupakan hal-hal yang terkait hukum, dan diselesaikan hanya melalui analisa hukum. Terdapat pula isu yang merupakan campuran antara hal-hal yang terkait fakta dan hukum, yang mana harus diselesaikan melalui 1) pencarian fakta-fakta yang relevan, 2) menentukan konsep hukum yang berlaku, 3) kemudian menerapkan konsep hukum tersebut terhadap fakta-fakta yang ditemukan.

Dalam menjawab isu-isu di dalam petitum atau *counter claim*, arbiter harus mendasarkan pertimbangannya dari informasi-informasi yang didapatkan di dalam:

- (1) Fakta-fakta yang telah disetujui oleh para pihak
- (2) Fakta-fakta yang tidak dibantah oleh para pihak
- (3) Bukti dokumentasi
- (4) Pendapat saksi ahli
- (5) Fakta-fakta yang didapatkan dari bukti
- (6) Hukum yang berlaku; dan
- (7) Permohonan, jawaban, replik, duplik, dan kesimpulan para pihak

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ *Ibid.*

Dalam menyusun substansi putusan arbitrase, arbiter juga perlu memperhatikan beberapa hal:¹⁹

- 1) Putusan harus meyakinkan (*cogency*), artinya harus berdasarkan dan menunjukan pertimbangan yang meyakinkan, persuasif dan konsisten. Putusan harus menguraikan seluruh fakta-fakta, klaim dan perlawanan yang didapatkan arbiter selama proses arbitrase.
- 2) Putusan harus lengkap (*completeness*), artinya harus memutuskan seluruh klaim yang diajukan, tetapi tidak boleh lebih dari itu.
- 3) Putusan harus bersifat pasti (*certainty*), artinya tidak boleh menggunakan susunan kata yang ambigu. Putusan tidak boleh menimbulkan keraguan atas maksud dari arbiter atau mengenai hal-hal yang harus dilakukan oleh para pihak.
- 4) Putusan harus bersifat final (*finality*), artinya tidak boleh memunculkan kesempatan untuk membuka kembali permasalahan-permasalahan yang sudah diputuskan. Putusan harus tidak bersyarat (*unconditional*) dan tidak boleh ada hal-hal yang tidak diputuskan.
- 5) Putusan harus dapat dilaksanakan (*enforceability*), artinya bentuk keputusan harus memungkinkan

untuk dilaksanakan oleh para pihak. Misalnya, jika arbiter memutuskan perlunya pembayaran sejumlah uang, harus disebutkan secara spesifik jumlah uangnya. Jika diputuskan salah satu pihak harus melaksanakan kontrak, harus disebutkan secara spesifik apa yang harus dilaksanakan dan kapan harus dilaksanakan.

- 6) Putusan hanya menyangkut hal-hal yang menjadi yurisdiksi arbitrase (*jurisdiction*), artinya hal-hal yang diputuskan tidak boleh melebihi petitum para pihak atau mengenai kaidah super memaksa.
- 7) Putusan harus sah secara hukum (*legality*), artinya arbiter tidak dapat memerintahkan salah satu pihak untuk melakukan hal yang melanggar hukum.
- 8) Putusan harus konsisten (*consistency*) artinya tidak berlawanan antara dalil satu dan dalil yang lain.

B. Beberapa Permasalahan dalam Pelaksanaan Persidangan Arbitrase tanpa Kehadiran Termohon

1. Dasar Hukum dan Referensi

- a. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
- Keabsahan pelaksanaan proses persidangan arbitrase tanpa kehadiran pihak Termohon telah

¹⁹ Ray Turner, *Op Cit*, hal 11.

diatur di dalam UU Arbitrase Pasal 44:

- 1) Apabila pada hari yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2), termohon tanpa suatu alasan sah tidak datang menghadap, sedangkan termohon telah dipanggil secara patut, arbiter atau majelis arbitrase segera melakukan pemanggilan sekali lagi.
- 2) Paling lama 10 (sepuluh) hari setelah pemanggilan kedua diterima termohon dan tanpa alasan sah termohon juga tidak datang menghadap di muka persidangan, pemeriksaan akan diteruskan tanpa hadirnya termohon dan tuntutan pemohon dikabulkan seluruhnya, kecuali jika tuntutan tidak beralasan atau tidak berdasarkan hukum.

b. BANI Rules and Procedures

Di dalam Peraturan dan Prosedur BANI, hal ini diatur dalam Pasal 22 par. 2:

Dalam hal Termohon lalai mengajukan Surat Jawaban, Majelis Arbitrase atau Arbiter Tunggal harus menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Termohon dan dapat memberikan perpanjangan jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari untuk mengajukan Jawaban dan/atau datang ke persidangan. Dalam hal Termohon

juga tidak datang ke persidangan setelah dipanggil secara patut dan juga tidak mengajukan Jawaban tertulis, Majelis Arbitrase atau Arbiter Tunggal harus memberitahukan untuk kedua kalinya kepada Termohon agar datang atau menyampaikan Jawaban. Apabila Termohon lalai menjawab untuk kedua kalinya tanpa alasan yang sah, Majelis Arbitrase atau Arbiter Tunggal serta-merta dapat memutuskan dan mengeluarkan putusan berdasarkan dokumen-dokumen dan bukti yang telah diajukan Pemohon.

c. CI Arb International Arbitration Practice Guideline on Party Non-Participation 2011

Referensi ketiga diambil dari pedoman yang dirancang oleh Chartered Institute of Arbitrators (CI Arb). CI Arb adalah suatu organisasi swasta yang berbasis di Inggris yang mana merupakan pusat pengembangan praktek dan profesi terkait dengan alternatif penyelesaian sengketa. Dalam menjalankan tugasnya, CI Arb memberikan edukasi dan pelatihan terhadap para arbiter, mediator dan adjudikator. Institusi ini juga bertindak sebagai penghubung global untuk para praktisi, pembuat kebijakan, akademik dan pelaku usaha untuk mendukung

perkembangan metode-metode APS.²⁰

Untuk menjamin standar dan kualitas metode arbitrase, CI Arb mengembangkan beberapa pedoman yang dapat digunakan oleh arbiter dalam menjalankan proses arbitrase. Hingga saat ini, CI Arb telah menerbitkan kurang lebih 20 pedoman dan protokol, salah satunya adalah pedoman dalam hal salah satu pihak tidak ikut berpartisipasi dalam proses persidangan. Meskipun pedoman dan protokol ini bukan merupakan dasar hukum yang mengikat sebagaimana undang-undang dan rules and procedure, namun dokumen ini patut untuk direferensi karena merangkum *best practice* dalam arbitrase komersial internasional.²¹

2. Masalah Pemanggilan Pihak

Dalam pasal 44 UU Arbitrase telah jelas diatur bahwa proses persidangan tanpa kehadiran termohon dapat dilaksanakan dalam hal:

1. Termohon tidak datang menghadap di muka sidang arbitrase pada tanggal yang sudah ditetapkan
2. Termohon tidak menyampaikan alasan yang sah terkait dengan ketidakhadirannya

3. Termohon kembali tidak datang menghadap paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah dilakukan pemanggilan kedua oleh arbiter/majelis

Dalam Peraturan dan Prosedur BANI, diatur perpanjangan jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari untuk datang ke persidangan. Tentu saja perpanjangan akan diberikan dengan didahului pemberian notifikasi dari pihak termohon.

Dalam hal pemanggilan, pengaturan di dalam CIARBI Guideline juga mengatur hal yang sama pada article 1 par. 1:

When faced with a non-participating party, "...", arbitrators should satisfy themselves, to the extent that they are able to do so, on the limited information available, "...", that all parties were properly notified of the proceedings. Arbitrators should also satisfy themselves that the non-participating party has no acceptable excuse for its non-participation.

Dua hal yang harus diperhatikan oleh majelis/arbiter terkait dengan pemanggilan para pihak yaitu:

- 1) Pihak termohon telah dipanggil secara patut dan sah. Dalam hal ini, arbiter/majelis harus memastikan bahwa prosedur pemanggilan termohon telah dipenuhi. Pasal 40 ayat (2) mengatur bahwa majelis/arbiter harus mengirimkan perintah kepada pemohon dan termohon untuk menghadap muka

²⁰ Info lebih lanjut tentang CI Arb: www.ciarb.org

²¹ Chartered Institute of Arbitrators. 2011. International Arbitration Practice Guideline on Party Non-Participation. London: CI Arb

sidang arbitrase paling lama 14 hari terhitung dari dikeluarkannya perintah tersebut.²² Alamat domisili termohon juga harus dipastikan sudah benar untuk memastikan bahwa termohon telah benar-benar menerima korespondensi dari majelis/arbitrer. Pengaturan mengenai domisili termohon tidak diatur di dalam UU Arbitrase, namun BANI Rules and Procedure pada pasal 4 par. 1 memberikan mandat kepada para pihak/kuasa hukumnya untuk menjamin bahwa BANI memiliki alamat terakhir dan nomor telepon, faksimili, e-mail pada setiap waktu untuk komunikasi yang diperlukan. Pada par. 3 diatur bahwa jika alamat termohon tidak dapat ditemukan, pemberitahuan dapat disampaikan melalui Kelurahan tempat domisul termohon terakhir yang diketahui berdasarkan informasi dari pemohon.

Dalam hal tergugat sedang berada di luar negeri atau sudah meninggal, maka dapat berpedoman pada ketentuan Hukum Acara Perdata. Jika termohon berada di luar negeri maka pengiriman dokumen perkara melalui jalur diplomatik.²³ Adapun dalam hal termohon telah meninggal dunia, maka pedoman pemanggilan

berdasarkan Pasal 390 ayat (2) HIR dan Pasal 7 Rv.²⁴

2) Pihak termohon tidak memberikan alasan yang sah. Perkara mengenai batas minimal suatu alasan ketidakhadiran dianggap sah, tidak diatur secara spesifik baik di dalam UU Arbitrase maupun di dalam BANI Rules and Procedure. Lagi-lagi, dalam hal ini, majelis/arbitrer harus berpedoman pada teori dan praktek yang berkembang di dalam Hukum Acara Perdata. Alasan yang dianggap sah dalam hal ini antara lain:²⁵

- Karena sakit yang dikuatkan dengan keterangan dokter
- Berada di luar kota atau luar negeri dengan bukti surat keterangan dari pihak yang berkompeten
- Sedang melaksanakan tugas dan menjalankan perintah atasan yang tidak dapat ditinggalkan

Dalam CIARBI Guideline diatur bahwa alasan yang dapat diterima oleh arbitrer adalah jika tidak hadirnya

²² Pasal 40 ayat (2) UU Arbitrase No. 30/1999

²³ M. Yahya Harahap. 2007. Hukum Acara Perdata. Jakarta: Sinar Grafika, hal 384

²⁴ Ibid, prosedur pemanggilan dalam HAPER dalam hal tergugat/termohon telah meninggal: 1) apabila ahli waris dikenal, panggilan ditujukan kepada semua ahli waris tanpa menyebut identitas mereka satu per satu dan panggilan disampaikan di tempat tinggal almarhum pewaris; 2) apabila ahli waris tidak dikenal, panggilan disampaikan melalui kepala desa di tempat tinggal terakhir almarhum pewaris.

²⁵ Ibid. Hal 387

termohon adalah disebabkan oleh kondisi-kondisi yang tidak terduga dan di luar kuasa pihak termohon. Jika kondisi tersebut terjadi dan dapat dibuktikan, maka majelis/arbitrer dapat memberikan kompensasi atau perpanjangan waktu.²⁶

3. Kewajiban Arbitrer untuk Memeriksa Pokok Perkara

Dapat dilihat bahwa secara umum, UU Arbitrase memberikan wewenang kepada arbitrer/majelis untuk melanjutkan proses persidangan arbitrase tanpa hadirnya termohon. Permasalahan yang timbul adalah bagaimana arbitrer/majelis melanjutkan pemeriksaannya. Satu hal yang perlu diperhatikan dalam pasal ini adalah kata-kata “tuntutan pemohon dikabulkan seluruhnya”, apakah ini berarti bahwa putusan akan dibuat dengan tujuan sepenuhnya memenuhi kepentingan pemohon dengan mengabulkan gugatan secara penuh? Pertanyaan ini kemudian dijawab pada kalimat selanjutnya bahwa putusan akan dikabulkan “kecuali jika tuntutan tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum”. Kalimat terakhir memberikan dampak bahwa arbitrer/majelis tidak dapat langsung mengabulkan seluruh klaim pemohon dengan alasan termohon tidak hadir.²⁷ Dalam hal ini arbitrer/majelis

dalam mengabulkan tuntutan pemohon harus terlebih dahulu memastikan bahwa tuntutan pemohon tidak memiliki kriteria “tidak beralasan” dan “tidak berdasarkan hukum”.

Dalam hukum acara perdata, yang termasuk sebagai “gugatan tidak beralasan” adalah yang tidak diajukan peristiwa-peristiwa yang membenarkan tuntutan.²⁸ Adapun “gugatan yang tidak berdasarkan hukum” adalah tidak dapat ditunjukkan hubungan hukum antara penggugat dengan materi atau objek yang disengketakan dan antara penggugat dengan tergugat berkaitan dengan materi atau objek sengketa.²⁹ Hal ini berarti bahwa arbitrer/majelis harus memeriksa pokok perkara pada permohonan dan tidak hanya terpaku pada hal-hal yang bersifat materiil.

4. Masalah Pembuktian

Lalu, bagaimana arbitrer/majelis dapat menimbang apakah suatu putusan tersebut beralasan dan berdasarkan hukum sedangkan klaim dan dokumen-dokumen bukti hanya berasal dari pemohon. Hal ini berarti bahwa klaim, bukti dan kronologi kasus yang diajukan oleh pemohon ke hadapan majelis/arbitrer tentu yang bersifat

menjadi fakta atau bukti pengakuan yang mana mengakhiri pemeriksaan. Lihat: M. Yahya Harahap, hal 506

²⁶ CIARBI Guideline, hal 4

²⁷ Hal ini sejalan dengan praktik pada Hukum Acara Perdata dimana jika tergugat (termohon) terhadap suatu fakta mengambil sikap berdiam diri maka tidak boleh dianggap bahwa suatu peristiwa

²⁸ Tidak dapat ditunjukkannya dasar fakta. Lihat: M. Yahya Harahap, *op cit*, hal. 58

²⁹ Tidak dapat ditunjukkannya dasar hukum, Lihat: *Ibid*.

meringankan pihak pemohon dan memberatkan pihak termohon. Artinya, mungkin saja terdapat beberapa dokumen atau bukti yang tidak diajukan oleh pemohon yang mana membuat klaim pemohon secara terang benderang tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum. Jika ada kecurigaan ini, apakah arbiter/majelis memiliki wewenang untuk menanyakan dan meminta pemohon untuk mengajukan dokumen dimaksud kepada arbiter? Sampai sejauh mana pembuktian harus dilaksanakan oleh pemohon?

Jika merujuk Hukum Acara Perdata Indonesia, putusan yang diambil tanpa kehadiran tergugat disebut sebagai putusan verstek. Putusan verstek diatur di dalam pasal 125 ayat (1) HIR yang mengatur bahwa:

Apabila pada hari yang telah ditentukan, tergugat tidak hadir dan pula ia tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, padahal ia telah dipanggil dengan patut maka gugatan itu diterima dengan putusan tak hadir (verstek), kecuali kalau ternyata bagi Pengadilan bahwa gugatan tersebut melawan hak atau tidak beralasan.

Seberapa jauh hakim perdata dapat memeriksa dan mengklarifikasi pihak penggugat dalam hal ini? Tidak pula begitu jelas diatur. Bahkan saat ini mulai muncul perdebatan tentang pembuktian dalam proses persidangan verstek. Perdebatan yang muncul adalah

yakni bagaimana proses pembuktian didalam proses persidangan yang bersifat verstek. Dalam asas pembuktian acara perdata dikenal prinsip “fakta yang tidak dibantah, tidak perlu dibuktikan”.³⁰ Jika mengacu pada prinsip ini, apakah artinya arbiter tidak lagi memerlukan pembuktian dan klarifikasi terhadap perkara pokok? Cukup dengan memastikan bahwa posita dan petitumnya berkaitan dan gugatan tidak berkaitan dengan hal-hal yang melawan hukum, maka arbiter dapat mengabulkan seluruh klaim pemohon. Maka jika arbiter mencurigai adanya dokumen-dokumen atau bukti-bukti yang tidak diajukan oleh pemohon yang sekiranya dapat membuat terang adanya fakta-fakta hukum yang menyebabkan posisi gugatan menjadi lemah, arbiter tidak lagi perlu meminta pembuktian ini terhadap pemohon.³¹

Prinsip tersebut mungkin dapat diberlakukan dalam konteks arbitrase. Rules and Procedure BANI sendiri mengatur pembuktian dalam proses persidangan arbitrase tanpa kehadiran termohon pada pasal 21 ayat 2 yang mengatur:

“... If the Respondent fails to respond for the second time

³⁰ *Ibid.*

³¹ Hal ini berkaitan dengan prinsip dalam Hukum Acara Perdata dimana hakim bersifat pasif yaitu adalah bahwa hakim tidak dibenarkan mengambil prakarsa aktif meminta para pihak mengajukan atau menambah pembuktian yang diperlukan. Lihat, M. Yahya Harahap., *Ibid.* Hal 500

without any valid reason, the Tribunal may decide and make its award based upon the documents and evidence which have been submitted by the Claimant."

Disini terlihat bahwa pemeriksaan tetap dilakukan oleh arbiter dan majelis terhadap pokok perkaranya, hanya saja pertimbangan pada putusan hanya didasarkan pada dokumen dan bukti-bukti yang diajukan oleh pemohon. Artinya arbiter disini bersifat pasif sehingga ia tidak boleh meminta pihak pemohon untuk mengajukan suatu dokumen sebagai pembuktian.

CIARB Guidelines memberikan pedoman yang lebih rinci. Dalam CIARB Guidelines, arbiter diminta untuk lebih berhati-hati dan memastikan bahwa dalil dan bukti yang diajukan oleh pihak yang hadir adalah beralasan berdasarkan fakta maupun berdasarkan hukum. Terkait dengan kondisi dimana suatu peristiwa/fakta/bukti beban pembuktiannya ada pada pihak yang tidak hadir (termohon), maka arbiter harus menyatakan bahwa peristiwa/fakta/bukti tidak dapat dimenangkan dengan alasan tidak adanya bukti yang diajukan.

Proses persidangan arbitrase tanpa kehadiran pemohon, meskipun mirip dengan persidangan *verstek* di dalam hukum perdata, tidak dimungkinkan adanya perlawanan atau *verzet*. Artinya, satu-satunya cara pihak termohon yang tidak terima dengan putusan arbitrase yang diucapkan tanpa

kehadiran untuk melakukan perlawanan adalah dengan membatalkan putusan arbitrase tersebut. Untuk itu kehati-hatian arbiter dalam memastikan putusan yang dirancang adalah sesuai dengan fakta dan tidak berlawanan hukum sangat diperlukan.

III. Kesimpulan

Majelis/arbiter berwenang untuk tetap melanjutkan proses persidangan arbitrase dan memeriksa pokok perkara walaupun pihak termohon tidak hadir. Sayangnya, belum ada pedoman yang ekstensif yang dapat dijadikan panduan oleh arbiter dalam menjalankan proses persidangan seperti itu terutama terkait dengan pembuktian dan pemeriksaan perkara. Beberapa prinsip dan peraturan yang diatur dalam Hukum Acara Perdata mungkin dapat diadopsi untuk menjawab beberapa hal yang tidak diatur di dalam kerangka hukum arbitrase di Indonesia. Perlu adanya upaya untuk mengembangkan suatu kerangka pedoman bagi para arbiter agar terdapat kesamaan dan penjaminan kualitas terhadap putusan-putusan yang dibuat dalam proses persidangan tanpa kehadiran termohon.

Bibliografi

Buku

- C. Schreuer. 2008. What is a Legal Dispute? Dalam I. Buffard et al (ed), International Law beetwen

- Universalism and Fragmentation.
Leiden: Martinus Nijhoff Publishers
- Henry J. Brown & Arthur L. Marriott. 1993.
ADR Principles and Practice.
London: Sweet & Maxwell.
- I Made Widnyana. 2009. Alternatif
Penyelesaian Sengketa (ADR).
Jakarta: PT. Fikahati Aneska.
- Johanes, Gunawan. 2011. Kajian Ilmu
Hukum Tentang Kebebasan
Berkontrak, Dalam Butir-Butir
Pemikiran dalam Hukum,
Memperngati 70 Tahun Prof. Dr. B.
Arief Sidharta, S.H. Bandung:
Refika Aditama.
- Frederick S. Merritt, et al. 1998. Standard
Handbook for Civil Engineers.
McGraw-Hill Professional
Publishing.
- M. Yahya Harahap. 2014. Hukum Acara
Perdata. Jakarta: Sinar Grafika.
- Nazarkhan Yasin. 2003. Mengenal Klaim
konstruksi & Penyelesaian
Sengketa Konstruksi. Jakarta: PT.
Gramedia Pustaka Utama.
- Peter Lovenheim & Lisa Guerin. 2004.
Mediate, Don't Litigate: Strategies
for Succesful Mediation. US: Nolo.
- Priyatna Abdurrasyid. 2011. Arbitrase
dan Alternatif Penyelesaian
Sengketa (APS): Suatu Pengantar.
PT Fikahati Nafiska
- Ray Turner. 2005. Arbitration Awards: A
Practical Approach. UK: Blackwell
Publishing.

Artikel

- Aragaki, Hiro N., Arbitration: Creature of
Contract, Pillar of Procedure (May
3, 2018). 8 Y.B. Arb. & Mediation 2
(2016); Loyola Law School, Los
Angeles Legal Studies Research
Paper No. 2018-14.
- Helmi Kasim, Arbitrase Sebagai
Mekanisme Penyelesaian
Sengketa Penanaman Modal
(*Arbitration as Investment Dispute
Settlement Mechanism*), Jurnal
Rechtsvinding: Media Pembinaan
Hukum Nasional, Volume 7, Nomor
1, April 2018.
- [...], Arbitration Potholes: One Party
Won't Provide Discovery,
[http://www.daveadr.com/arbitration
-potholes-one-party-wont-provide-
discovery/](http://www.daveadr.com/arbitration-potholes-one-party-wont-provide-discovery/), akses tanggal 6
September 2018

Regulasi

- Undang-Undang No. 30 Tahun 1999
tentang Arbitrase dan Alternatif
Penyelesaian Sengketa
(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 138,
Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3872)
- ICC Arbitration Rules
- SIAC Rules Tahun 2013
- LCIA Arbitration Rules